



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 117 /KEP/HK/2023**

TENTANG

TIM ASISTENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 yang meliputi kegiatan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan akuntansi, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban, perlu dilakukan koordinasi secara terpadu agar memenuhi prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan koordinasi secara terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Asistensi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

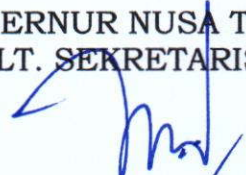
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dari Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan koordinasi secara terpadu dalam penyelesaian kegiatan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan akuntansi, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Bagi anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang merupakan Tenaga Honorer/Tidak Tetap, pelaksanaan tugasnya dalam Tim, berakhir pada tanggal 28 November 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 14 MARET 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
PLT. SEKRETARIS DAERAH

  
**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015

**Tembusan:**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 117 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 14 MEI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASISTENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mengarahkan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pelaksanaan APBD TA. 2023.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Bersama Gubernur mengarahkan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pelaksanaan APBD TA. 2023.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. mengoordinir pelaksanaan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2023; b. mengoordinir penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Pertanggungjawaban (Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022); c. mengoordinir pelaksanaan tugas-tugas Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah; d. mengoordinir penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban (Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022); dan e. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator I	Membantu Koordinator dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pelaksanaan APBD TA. 2023 (Bidang Pemerintahan dan Kesra.
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator II	Membantu Koordinator dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pelaksanaan APBD TA. 2023 Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator III	Membantu Koordinator dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pelaksanaan APBD TA. 2023 (Bidang Administrasi Umum.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinir Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan atas Pengelolaan APBD TA. 2023;</li> <li>b. memimpin rapat atas Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan APBD TA. 2023;</li> <li>c. bertanggungjawab atas Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan APBD TA. 2023;</li> <li>d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur, melalui Sekretaris Daerah</li> </ul>
8.	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua I	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. merencanakan operasional penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT meliputi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku agar tersedia pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tepat waktu;</li> <li>b. mengoordinir dan meneliti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2023;</li> <li>c. mengkonsolidasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari masing-masing Perangkat Daerah; dan</li> <li>d. mengoreksi hasil pemeriksaan SPJ dan menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SPJ berdasarkan ketentuan yang berlaku;</li> </ul>
9.	Kabid. Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua II	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoreksi dan menyempurnakan konsep Rancangan Anggaran Penanganan Urusan Pemerintah Provinsi (KUA dan PPAS) berdasarkan RKPD dan RPJMD sebagai bahan penyusunan Perubahan APBD TA. 2023;</li> <li>b. mereviu dan membahas RKA-SKPD bersama TAPD berdasarkan KUA dan PPAS untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2023;</li> <li>c. mengoreksi dan menyempurnakan konsep rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2023 serta Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD berdasarkan KUA dan PPAS untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Perda dan Pergub;</li> <li>d. meneliti dan mengoreksi DPA Perangkat Daerah yang telah disusun berdasarkan Penjabaran APBD untuk dijadikan dasar pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah; dan</li> <li>e. mengoreksi dan meneliti usulan perubahan anggaran dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk bahan Penyusunan Perubahan APBD TA. 2023</li> </ul>

10.	Kabid. Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua III	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan langkah-langkah operasional pengelolaan keuangan daerah meliputi : menyiapkan anggaran kas, menyiapkan SPD dan menandatangani SP2D;</li> <li>b. mengoordinir pelaksanaan TPTGR;</li> <li>c. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD TA. 2023 yang dilakukan oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainya yang ditunjuk; dan</li> <li>d. melaksanakan Penatausahaan investasi daerah.</li> </ul>
11.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinir penyusunan laporan pelaksanaan Budaya Kerja, Pengawasan Melekat, Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Daerah dan pelaporan kinerja lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;</li> <li>b. menyelenggarakan penyusunan laporan kinerja, dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja SKPD; dan</li> <li>c. melakukan koordinasi pencatatan atas pelaporan barang milik daerah TA. 2023.</li> </ul>
12.	Kabid. Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengarahkan penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD TA. 2023 dan Ranperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023, serta Ranperda dan Ranpergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 pada 22 Kab/ Kota sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;</li> <li>b. melakukan evaluasi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD TA. 2023 dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023, serta Ranperda dan Ranpergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 di 22 Kab/Kota sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;</li> <li>c. menyusun rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD TA. 2023 dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023, serta Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 serta Ranperda dan Ranpergub Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021 di 22 Kab/Kota sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan</li> <li>d. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil dari APBD Provinsi pada APBD Kabupaten/ Kota.</li> </ul>

13.	Remmy Ch. Pah, S.STP, M.Si/Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, LKPJ, LPPD, Laporan Kinerja Daerah TA. 2023 dan pelaporan kinerja lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan masukan bagi atasan.
14.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan penyusunan Laporan Keuangan SKPD; b. memverifikasi dan membuat pengesahan atas penerimaan dan pengeluaran TA. 2023; dan c. mengontrol administrasi pengelolaan keuangan Badan Keuangan Daerah selaku SKPD.
15.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan pencatatan dan pelaporan barang milik daerah TA. 2023 pada Badan Keuangan Daerah.
16.	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinir kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan pada satuan kerja sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; b. melakukan verifikasi SKRD dan STS yang dikirim bendahara Penerimaan untuk meneliti kembali sisi Kas yang belum setor dan memberikan advise pada nota catatan hasil pemeriksaan SPJ Pendapatan Perangkat Daerah; c. meneliti kebenaran bukti pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan beserta lampiran-lampirannya untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan; d. mencatat semua tanda setoran serta STS penerimaan kas ke dalam buku Bantu atau buku kontrol untuk tertib administrasi; dan e. melakukan verifikasi pendapatan BLUD untuk disahkan oleh PPKD; f. melaksanakan penatausahaan pengelolaan investasi daerah; g. mengoordinir penyiapan perangkat aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah atas pelaksanaan APBD TA. 2023; h. menyiapkan proses penyusunan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
17.	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengkoordinir kegiatan pengumpulan dan pengolahan data Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada satuan kerja sebagai bahan penyusunan neraca keuangan; b. melakukan verifikasi SPM UP/GU/TU dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, meneliti dokumen yang dikirim bendahara pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan dan memberikan advise pada nota catatan hasil pemeriksaan SPJ dan Belanja Daerah; c. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data analisis terhadap anggaran belanja Perangkat Daerah agar terkumpul data serta dapat memberikan rekomendasi untuk pengajuan dan penyusunan anggaran tahun berikutnya. d. mengkaji dan mengolah data laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>e. meneliti kebenaran dan kelayakan pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah;</li> <li>f. menyusun Laporan Konsolidasi Tahunan Pemerintah Daerah.</li> </ul>
18.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun konsep KUA dan PPAS untuk Perubahan APBD TA. 2023 bidang Perekonomian dan Pembangunan;</li> <li>b. menyiapkan bahan-bahan dan data serta memfasilitasi pembahasan RKA-Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>c. mereviu dan membahas RKA-Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama TAPD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD TA. 2023;</li> <li>d. meyusun dan meneliti konsep rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2023 Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan lampirannya;</li> <li>e. menyusun dan meneliti Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD serta lampiran penjabaran Perubahan APBD Bidang Perekonomian dan Pembangunan;</li> <li>f. menyiapkan data dan menyusun konsep kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, pemberian pinjaman daerah dan investasi pemerintah daerah;</li> <li>g. menyusun rencana anggaran belanja provinsi Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang akan dibiayai dari dana DAK.</li> </ul>
19.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Bidang Administrasi Umum) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep Nota Keuangan dan Pengantar Nota Keuangan APBD TA. 2023 dan Perubahan APBD;</li> <li>b. menyiapkan bahan dan data serta membantu menyusun konsep tanggapan Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD TA. 2023;</li> <li>c. menyiapkan materi dan menyusun pedoman, standar satuan harga dan analisis belanja daerah, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan APBD;</li> <li>d. menyusun dan meneliti konsep Rencana Anggaran Kas dan SPD untuk PD lingkup Bidang Administrasi Umum;</li> <li>e. meneliti usulan revisi DPA-PD dan menyusun konsep surat tanggapan terhadap usulan revisi dari PD lingkup Bidang Administrasi Umum;</li> <li>f. meneliti usulan revisi DPA-PD dan menyusun konsep surat tanggapan terhadap usulan revisi dari PD lingkup Bidang Administrasi Umum; dan</li> <li>g. mengatur pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Daerah Bidang Administrasi Umum.</li> </ul>

20.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pembangunan dan Kesra pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep Nota Keuangan dan Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD TA. 2023 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;</li> <li>b. menyusun dan meneliti konsep Rencana Anggaran Kas dan SPD untuk PD lingkup Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;</li> <li>c. menyiapkan data dan menyusun konsep kebijakan pendanaan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang menjadi tanggung jawab bersama antara provinsi dan Kabupaten/Kota;</li> <li>d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/Pihak-Pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyusunan Perubahan APBD TA. 2023.</li> </ul>
21.	Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. meneliti dan mengkaji kelayakan materi evaluasi Rancangan Perubahan APBD TA. 2023 serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Kabupaten/Kota Wilayah I (wilayah Flores) sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengesahan;</li> <li>b. menyusun konsep Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perubahan APBD TA. 2023 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Kabupaten/ Kota Wilayah I (Wilayah Flores) berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ditindaklanjuti;</li> <li>c. mengatur dan melaksanakan pendistribusian Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perubahan APBD TA. 2023 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Kabupaten/ Kota Wilayah I; dan</li> <li>d. menghimpun, mengolah dan menyusun rekapitulasi dana APBD TA. 2023 dan Perubahan APBD TA. 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Kabupaten/ Kota untuk penyusunan Statistik Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li> </ul>
22.	Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan mengidentifikasi laporan permasalahan pengelolaan keuangan Kabupaten Wilayah II untuk Wilayah Sumba, Lembata, Alor dan Sabu Raijua serta perkembangannya;</li> <li>b. menyelenggarakan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten Wilayah II untuk Wilayah sumba, Lembata, Alor dan Sabu Raijua;</li> <li>c. mengkaji dan mengidentifikasi Perubahan APBD TA. 2023 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Kabupaten/ Kota; dan</li> <li>d. melaksanakan koordinasi pengusulan DAK Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>

23.	Dra. Yenny C.M. Izaac, M.Si/Analisi Keuangan Daerah Muda pada Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyajikan data keuangan Kabupaten/ Kota Wilayah III untuk Wilayah Timor dan Rote Ndao TA. 2023 dalam format evaluasi;</li> <li>b. menyusun dan mengidentifikasi laporan permasalahan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota Wilayah III untuk Wilayah Timor dan Rote Ndao serta perkembangannya; dan</li> <li>c. menyusun konsep Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perubahan APBD TA. 2023 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 Kabupaten/Kota Wilayah III.</li> </ul>
24.	Kepala Sub Bidang Pembayaran Pemerintahan dan Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pengujian tagihan pembayaran berdasarkan SPM yang diajukan oleh Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;</li> <li>b. menguji kelayakan pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambah Uang PERSediaan serta LS Barang dan Jasa;</li> <li>c. meneliti jumlah pembayaran yang diberikan berdasarkan ketersediaan dana;</li> <li>d. memaraf rekapitulasi pembayaran menurut rekening kas umum daerah; dan</li> <li>e. membuat laporan pelaksanaan penerimaan dana transfer, dan dana hibah Bantuan Luar Negeri (BLN).</li> </ul>
25.	Kepala Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menghimpun dan menganalisa data serta menyajikan laporan hasil kegiatan;</li> <li>b. menyusun konsep Keputusan Gubernur tentang penunjukan pejabat pengelola APBD berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah;</li> <li>c. melakukan penagihan piutang daerah; dan</li> <li>d. melaksanakan tugas Sekretaris Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengembalian kerugian daerah</li> </ul>
26.	Helena W. Yacoba Lema, SE/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menghimpun dan menganalisa data serta menyajikan laporan hasil kegiatan;</li> <li>b. menyusun konsep Keputusan Gubernur tentang penunjukan pejabat pengelola APBD berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah;</li> <li>c. melakukan penagihan piutang daerah; dan</li> <li>d. melaksanakan tugas Sekretaris Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengembalian kerugian daerah.</li> </ul>

27.	Gratia Florida Mae, S.Sos, MM/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua I menyelesaikan tugas-tugas terkait Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
28.	Vincentia Nona, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
29.	Kristianus Th. K. Assan, A. Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
30.	Jun Erna Nawi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
31.	Yeti Marlina Toda, SE, M.Si/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
32.	Wahyu Santi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
33.	Afliana N. B. Seran, SE, MM/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
34.	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
35.	Nuzulul Atmayudha Putri, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
36.	Jacklyn Asrit, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
37.	Oshin Yuneldi Lani, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
38.	Rudi Wahono Putro, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
39.	Yustina Somi, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
40.	Antonius Dionisius Lamahoda, S.Pi/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
41.	Alexander Sina Wuan, A.Md/ Staf Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
42.	Maria Elisabeth Th.M. Repu, S.Ak/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

43.	Villigius Raga Pita, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua I menyelesaikan tugas-tugas terkait Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
44.	Lylian Yunike Hage, S.Pd/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
45.	Cayan Magdalena H. Poeh, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
46.	Sonya Margaretha Asa/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
47.	Agnes Flori Manu/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
48.	Ivan Januar Christian, S.St/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
49.	Hermanus Pello Nggadas, S,Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
50.	Charmin Willem Dwi Djampi, SM/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
51.	Musa Sufi Duru/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
52.	Satrya Dindus Liwe, SE/ Staf Daerah Provinsi NTT		
53.	Patrisia Maria Arthania, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
54.	Heriyanto Jemi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
55.	Angelina Pola Sutjiadi, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
56.	Felixianus Siger Loba Randu, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

57.	Joab Beda, S.Sos/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua II menyiapkan langkah-langkah operasional dalam rangka Penyusunan Perubahan APBD TA. 2023, standar biaya, dana cadangan dan investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.
58.	Alfrit Alfianto Fangidae, A. Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
59.	Jumsar, S.Pi, M.Si/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
60.	Anselmus Bhui/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
61.	Marselinus Nani, SH/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
62.	M. Syahril, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
63.	Sisilia Nineng Da Gomez, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
64.	Ivan Jerry Putra Adoe/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
65.	Klau Marini G. Sarlotha, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
66.	Febrina Mone/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
67.	Subeny Sulistywati, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua II menyiapkan langkah-langkah operasional dalam rangka Penyusunan Perubahan APBD TA. 2023, standar biaya, dana cadangan dan investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.
68.	Oktovianus Saka, S.AK/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
69.	Andini Raenun Putri Sidin/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
70.	Muhammad Khuzullifsar, S.Pi/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
71.	Richardo D. Putra Djogo, S.Ak/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
72.	Gootried Seki Tabeni, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

73.	Ni Wayan Bagiani, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris dalam penyelenggaraan Pembinaan Keuangan Kabupaten/ Kota baik administrasi maupun teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
74.	Yane Kornelia Liu, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
75.	Putri Rani Ari Sandi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
76.	Ivo Timbul Siboro, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
77.	Siti Aisyah Rahmawati, SE, M.Acc/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
78.	Frederikus R. Mite/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
79.	Christian Nalle/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
80.	Adrianus Banu/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
81.	Diah Kristiningtyas, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
82.	Herlin Yudensiana Hane, SH/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
83.	Maria Margareta Dhey, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
84.	Napoleao Januario Do Rego / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
85.	Simon O. Mere Djoka/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
86.	Dian Sugiarto Putra Hendrikus, SH/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
87.	Oktaviani Wowor, S.Pd/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

88.	Samuel Herdi Watileo/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris dalam penyelenggaraan Pembinaan Keuangan Kabupaten/ Kota baik administrasi maupun teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
89.	Febriana Crisanty Senin, S.AB/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
90.	Salwa Pua Dawe, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
91.	Markus M.F. Mau/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NT		
92.	Bayu Taruna B. Louis, SH/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NT		
93.	James Ronaldi Seubelan, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NT		
94.	Teresa De Jesus, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua IV untuk pelaksanaan kegiatan dan pembinaan, pemberian dukungan administrasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah Tahun Anggaran 2023.
95.	Juliana Selfintje Ngale, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
96.	Alexander Agung Watu Raka, S. Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
97.	Celsilia Denciana/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
98.	Lourdes Vicente Viegas/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
99.	Marselina Ariany Pekambani, S. STP/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
100	Jabalnur Kanda, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
101	Afliana Wehelmina Talluta, S.IP/ Staf Sekretariat pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
102	Katiana Tasya Wadu, S.Kom/ Staf Sekretariat pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

103	Maria Rosalina Meo, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua IV untuk pelaksanaan kegiatan dan pembinaan, pemberian dukungan administrasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah Tahun Anggaran 2023.
104	Andry Anin/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
105	Nyoman A.K.Ch. Marthayasa, SH/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
106	Marthina Tiro, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
107	Henderina Kaho, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
108	Igno Ignasius L. Sada Sela, S.Pi/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
109	Fenizia Maia Do Rego/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
110	Ester Maria V.V. De Jesus, S.Km/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
111	Maria M. Usfinit/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
112	Yutria Seran Malik, S.Pd/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
113	Andri Mark Mboeik, S.Tr.M/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
114	Paula E.R. Ngoma Sabarua, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
115	Lily Desryanti Koli, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
116	Nancylia Carolin Handatu, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

117	Dionisius Kayus Nahak, ST/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua IV untuk pelaksanaan kegiatan dan pembinaan, pemberian dukungan administrasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah Tahun Anggaran 2023.
118	Veronika Aurelya Langotukan, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
119	Ana Listra, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
120	Rizka Elisabeth C. Bessie, S.AB/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
121	Roy Ricardson Obeng Laikopan, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
122	Yohanes Keko, SH/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
123	Anselmus Asuat/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
124	Yolanda Elenita Bere Ati, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
125	Tenga Febriyanti Itu, S.Ak/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
126	Endaryati, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua III dalam melaksanakan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan, kesejahteraan, administrasi umum, perekonomian dan pembangunan serta penatausahaan investasi daerah.
127	Agatha Lusia Abuk, A. Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
128	Adel Meryquin A. Maing, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
129	Asran Irawan Sanda, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
130	Abdul Haris Mau, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
131	Anastasia Krisnawaty Kenahin, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

132	Ita Marlina Feri Aritonang, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua III dalam melaksanakan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan, kesejahteraan, administrasi umum, perekonomian dan pembangunan serta penatausahaan investasi daerah.
133	Reginaldo Kapilawi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
134	Welmince Baitanu, A. Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
135	Juanita Bengngu, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
136	Wilson Tiger Seo Man Mone, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
139	Sefrin Arianto Baun, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
140	Fransiska C. Yeni Endy, S.Kom/ Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
141	Yanuario A.N. Dhaki, ST/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
142	Siprianus Seberan/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
143	Yosep Fransiskus Dalla, SH/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
144	Maria Anastasia Moi Balu, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
145	Carla Ivonia Parera, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
146	Adrian L. Baimetan/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
147	Catarini W. J. Kana/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
148	Harybertus M.L. Geto, S.Tr.M/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

149	Dave Shindu Gumay/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua III dalam melaksanakan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan, kesejahteraan, administrasi umum, perekonomian dan pembangunan serta penatausahaan investasi daerah.
150	Josef Carlos Tangkas Maan, S.Ak / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
PLT SEKRETARIS DAERAH *re*

*1* **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015